

TESIS

**KERJASAMA *BUSSINES to BUSSINES* (B to B)
DALAM SKEMA *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP*
(KPBU) DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PERUMDA GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK**



Oleh:

Yulin Darwati
NIM : 091924453007

**PROGRAM STUDI MAGISTER
SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS

**KERJASAMA *BUSSINES to BUSSINES* (B to B)
DALAM SKEMA *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP*
(KPBU) DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PERUMDA GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK**

Oleh:

**Yulin Darwati
NIM : 091924453007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER
SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS

**KERJASAMA *BUSSINES to BUSSINES* (B to B)
DALAM SKEMA *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP*
(KPBU) DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PERUMDA GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK**

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Sains Hukum dan Pembangunan
Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Oleh:

Yulin Darwati
NIM : 091924453007

**PROGRAM STUDI MAGISTER
SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 7 JULI 2022

Oleh :

Pembimbing Ketua



Dr. Faizal Kurniawan S.H. M.H.,LL.M.
NIP. 198402172006041001

Pembimbing Kedua



Dr. Prawitra Thalib, S.H.,M.H.
NIP. 198511162014041001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Program Magister
Sains Hukum dan Pembangunan



Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.
NIP. 19771019200312100

TELAH DIUJI PADA

TANGGAL : 7 JULI 2022

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M

Anggota :

1. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.H
2. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.
3. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
4. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H..

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulin Darwati
NIM : 091924453007
Program Studi : Magister Sains Hukum dan Pembangunan
Judul Tesis : Kerjasama *Bussines to Bussines* (B to B) Dalam Skema
Public Private Partnership (KPBU) Dalam Penyediaan
Infrastruktur Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya ini adalah asli (hasil karya sendiri) bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (Plagiarism) dari karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik.

Dalam tesis ini tidak terdapat pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan didalam daftar pustaka. Demikian, pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 7 Juli 2022



Yulin Darwati
NIM : 091924453007

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan tesis dengan judul *KERJASAMA BUSSINES to BUSSINES (B to B) DALAM SKEMA PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (KPBU) DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERUMDA GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK*.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan segala bantuan, dukungan serta doanya kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Rasa terima kasih sebesar – besarnya kepada

1. Prof. Badri Munir Sukoco, S.E., M.B.A., Ph.D selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
2. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.H selaku wakil Direktur II Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
3. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M selaku Koordinator Program Studi Program Magister Sains Hukum dan Pembangunan dan Penguji.
4. Dr. Faisal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M selaku Pembimbing I dan Penguji yang telah membantu memberikan bimbingan, kritik, saran serta arahan yang baik kepada penulis.
5. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H selaku Pembimbing 2 dan Penguji yang telah membantu memberikan bimbingan, kritik, saran serta arahan yang baik kepada penulis.
6. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M selaku ketua penguji .
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan yang telah berbagi ilmu dan memberikan pencerahan kepada penulis.
8. Direksi dan Pegawai Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik yang sudah memberikan support dan data yang dibutuhkan.
9. Kedua orang tua (Bapak Samsu dan Ibu Kasmianti) yang selalu memberikan dukungan secara langsung maupun dalam doa serta menyemangati dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

10. Suami dan anak-anak tercinta yang telah memberikan dukungan.
11. Teman seperjuangan Mahasiswa Magister Sains Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga yang telah memberikan saya semangat hingga Tesis ini selesai serta semua pihak yang terlibat dalam membantu, menyemangati saya hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini

Penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidaklah luput dari kesalahan, hasil karya penulis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini. Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Surabaya, Juli 2022

Penulis

RINGKASAN

**KERJASAMA *BUSSINES to BUSSINES* (B to B)
DALAM SKEMA *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP*
(KPBU) DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PERUMDA GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK**

Yulin Darwati

Dalam rangka memenuhi pelayanan air bersih ke wilayah Gresik Kota dan pengembangan cakupan pelayanan ke wilayah Gresik Utara yang belum terlayani oleh Perumda, Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik merencanakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kapasitas 1.000 liter/detik melalui pemanfaatan air baku Sungai Bengawan Solo di titik pengambilan Bendung Gerak Sembayat (BGS), Kecamatan Bungah. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui kerjasama Badan Usaha dengan sistem *Business to Business* (B to B).

Proses pengadaan Badan Usaha berpedoman pada peraturan internal perusahaan yang disusun oleh perusahaan dalam hal ini Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Sistem Penyediaan Air Minum pada pasal 7 ayat (9). Peraturan internal Perusahaan tentu harus mengacu pada regulasi pemerintah yang berlaku. Sejauh ini, regulasi pemerintah terkait kerjasama pengembangan SPAM dengan mekanisme B to B masih sangat minim. Peraturan seputar kerjasama pengembangan SPAM lebih fokus mengatur tentang KPBU, sehingga dalam penyusunan peraturan internal perusahaan tentang pengadaan badan usaha berpedoman pada peraturan pemerintah terkait KPBU. Dengan minimnya peraturan yang mengatur khusus tentang B to B dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari karena mekanisme KPBU dan B to B berbeda. Pada proyek dengan skema KPBU, investor bisa mendapatkan dukungan fiskal maupun nonfiskal. Sementara itu, pada skema B to B, investor dan mitra tidak mendapatkan dukungan dana dan menanggung seluruh pembiayaan serta risiko proyek. Selain itu dalam pelaksanaannya, Kerjasama B to B berdasarkan Peraturan Internal sedangkan untuk KPBU pelaksanaannya sudah diatur dalam Peraturan yang berlaku.

Dalam proses pelaksanaan Kerjasama B to B terdapat kendala yaitu setelah *Detail Engineering Design* (DED) disepakati oleh Perumda Giri Tirta dan PT.Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta (PPKT), selaku badan usaha terdapat perubahan nilai capex karena adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan yang disebabkan oleh *public otority* yaitu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII dan kondisi tanah di bawah permukaan (*property authority*), optimalisasi desain, sehingga terjadi perubahan ruang lingkup akibat kebutuhan lapangan yang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama sehingga memerlukan addendum perjanjian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan untuk melakukan perubahan nilai investasi dalam kerjasama pengembangan SPAM melalui mekanisme *Business to Business* (B to B) di Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik dan menganalisis upaya yang harus dilakukan agar perubahan nilai investasi

dalam kerjasama pengembangan SPAM melalui mekanisme *Business to Business* (B to B) di Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data pokok diperoleh melalui penelitian peraturan-peraturan hukum tentang KPBU dan melalui pengamatan (observasi) langsung di lapangan yaitu proses pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pengembangan SPAM 1.000 liter/detik pada Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik.

Kendala yang terjadi selama masa pembangunan proyek yang berimplikasi pada perubahan ruang lingkup pekerjaan adalah adanya *public otority* Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII/ BBPJN VIII dalam pemasangan jaringan pipa, metode pondasi tiang pancang bangunan area intake, IPA, dan Reservoir, serta pekerjaan galian batu dan saluran intake yang berbeda antara dokumen penawaran dengan kondisi di lapangan. Hal tersebut menyebabkan perubahan pada nilai capex investasi sehingga perlu adanya pelaksanaan addendum perjanjian kerjasama.

Dalam peraturan terkait perubahan pekerjaan KPBU, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pada Pasal 32 ayat (2) huruf m bahwa pada dasarnya perubahan/ addendum terhadap Perjanjian KPBU *Business to Business*, dalam hal ini Perjanjian Kerjasama antara Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik dan PT Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta, yang disebabkan adanya perubahan ruang lingkup kerjasama dapat dilakukan sepanjang terdapat mekanisme perubahan/addendum yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.

Sebelum melaksanakan addendum perjanjian, Perumda Giri Tirta dan PT Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta melakukan konsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Atas saran BPKP, kedua pihak yang terikat perjanjian perlu meminta ahli hukum independen untuk memberikan *Legal of Opinion* (LO) terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang menjadi landasan dilakukannya perubahan/addendum perjanjian. LO dari ahli hukum independen kemudian diserahkan kepada BPKP untuk selanjutnya BPKP memberikan rekomendasi agar Perumda Giri Tirta dan PT Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta menunjuk konsultan independen guna melakukan perhitungan kelayakan proyek dalam *financial model* yang nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak. Perubahan nilai investasi dan addendum Perjanjian Kerjasama antara Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik dan PT Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta dapat dilakukan dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan terkait KPBU dan perjanjian kerjasama.

SUMMARY

BUSSINES to BUSSINES COOPERATION (B to B) IN THE PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP SCHEME (PPP) IN INFRASTRUCTURE PROVISION PERUMDA GIRI TIRTA, GRESIK REGENCY

Yulin Darwati

In order to fulfill clean water services to the Gresik City area and to develop service coverage to the North Gresik area which has not been served by Perumda, Perumda Giri Tirta Gresik Regency plans to develop a Drinking Water Supply System (SPAM) with a capacity of 1,000 liters/second through the use of raw water from the Bengawan Solo River. at the collection point of the Sembayat Motion Weir (BGS), Bungah District. Capacity building is carried out through cooperation with Business Entities with the Business to Business (B to B) system.

The procurement process for Business Entities is guided by the company's internal regulations drawn up by the company, in this case Perumda Giri Tirta, Gresik Regency in accordance with the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 19/PRT/M/2016 concerning Provision of Support by the Central Government and/or Regional Governments in Cooperation Drinking Water Supply System in article 7 paragraph (9). The Company's internal regulations must of course refer to applicable government regulations. So far, government regulations related to cooperation in SPAM development with the B to B mechanism are still very minimal. Regulations regarding SPAM development cooperation are more focused on regulating PPPs, so that in the preparation of company internal regulations regarding the procurement of business entities, government regulations related to PPPs are guided. With the lack of regulations that specifically regulate B to B, it is feared that it could cause problems in the future because the PPP and B to B mechanisms are different. In projects with a PPP scheme, investors can get both fiscal and non-fiscal support. Meanwhile, in the B to B scheme, investors and partners do not receive financial support and bear all project costs and risks. In addition, in its implementation, B to B Cooperation is based on Internal Regulations, while for PPP the implementation has been regulated in the applicable regulations.

In the process of implementing the B to B Cooperation, there are obstacles, namely after the Detail Engineering Design (DED) was agreed upon by Perumda Giri Tirta and PT. Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta (PPKT), as a business entity there was a change in the value of capex due to changes in the scope of work caused by the public. authority, namely the National Road Implementation Center VIII and the condition of the subsurface soil (property authority), optimizing the design, so that there is a change in scope due to field needs that have not been stated in the Cooperation Agreement so that it requires an addendum to the agreement.

This study aims to analyze the basis for changing the value of investment in SPAM development cooperation through the Business to Business (B to B) mechanism at Perumda Giri Tirta Gresik Regency and analyze the efforts that must be made to change the investment value in SPAM development cooperation through the Business to Business mechanism. (B to B) in Perumda Giri Tirta, Gresik Regency, it is not against the laws and regulations. This study uses empirical juridical research methods. The basic data were obtained through research on legal regulations regarding PPPs and through direct field observations, namely the procurement process for business entities in the context of developing a 1000 liter/second SPAM at Perumda Giri Tirta, Gresik Regency.

Obstacles that occurred during the project development period that had implications for changes in the scope of work were the public authority of the VIII/BBPJN VIII National Road Implementation Center in the installation of pipelines, pile foundation methods for building intake areas, IPA, and reservoirs, as well as rock excavation and excavation work. different intake channels between the bid documents and the conditions in the field. This causes a change in the value of the investment capex, so it is necessary to implement an addendum to the cooperation agreement.

In the regulations related to changes in PPP work, it is regulated in Presidential Regulation Number 38 of 2015 concerning Government Cooperation with Business Entities in the Provision of Infrastructure in Article 32 paragraph (2) letter m that basically changes / addendums to the Business to Business PPP Agreement, in this case the Business to Business PPP Agreement. The collaboration between Perumda Giri Tirta, Gresik Regency and PT Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta, due to changes in the scope of cooperation can be carried out as long as there is an amendment mechanism/addendum regulated in the Cooperation Agreement.

Prior to implementing the addendum to the agreement, Perumda Giri Tirta and PT Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta held consultations with the Development and Finance Supervisory Agency (BPKP) Representative of East Java Province. On the advice of BPKP, the two parties bound to the agreement need to ask an independent legal expert to provide a Letter of Opinion (LO) on the provisions of the agreement that form the basis for the amendment/addendum to the agreement. The LO from an independent legal expert is then submitted to BPKP for further BPKP providing recommendations that Perumda Giri Tirta and PT Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta appoint an independent consultant to calculate project feasibility in a financial model which will later be agreed upon by both parties. Changes in the investment value and addendum to the Cooperation Agreement between Perumda Giri Tirta, Gresik Regency and PT Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta can be made on the basis of laws and regulations related to PPPs and cooperation agreements.

ABSTRAK

**KERJASAMA BUSSINES to BUSSINES (B to B)
DALAM SKEMA *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP*
(KPBU) DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PERUMDA GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK**

Yulin Darwati

Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik merencanakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kapasitas 1.000 liter/detik guna memenuhi pelayanan air bersih ke wilayah Gresik Kota dan pengembangan cakupan pelayanan ke wilayah Gresik Utara yang belum terlayani oleh Perumda. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha dengan sistem *Business to Business* (B to B), yaitu dengan PT Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta (PT PPKT).

Dalam proses pelaksanaannya, terdapat kendala yaitu setelah *Detail Engineering Design* (DED) disepakati oleh Perumda Giri Tirta dan PT. PPKT, terdapat perubahan nilai capex karena adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan yang disebabkan oleh *public otority* yaitu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII dan kondisi tanah di bawah permukaan (*property authority*), optimalisasi desain, menyebabkan perubahan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama sehingga memerlukan addendum perjanjian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan untuk melakukan perubahan nilai investasi dan upaya yang harus dilakukan agar perubahan nilai investasi dalam kerjasama pengembangan SPAM tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan addendum perjanjian, Perumda Giri Tirta dan PT Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta (PT PPKT) melakukan konsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Atas saran BPKP, kedua pihak perlu meminta ahli hukum independen untuk memberikan *Letter of Opinion* (LO) terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang menjadi landasan dilakukannya perubahan/addendum perjanjian dan perlu menunjuk konsultan independen guna melakukan perhitungan kelayakan proyek dalam *financial model* yang nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak.

Kata kunci : Kerjasama, invetasi, perjanjian, addendum perjanjian

ABSTRACT

BUSSINES TO BUSSINES COOPERATION (B to B) IN THE PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP SCHEME (PPP) IN INFRASTRUCTURE PROVISION PERUMDA GIRI TIRTA, GRESIK REGENCY

Yulin Darwati

Perumda Giri Tirta Gresik Regency plans to develop a Drinking Water Supply System (SPAM) with a capacity of 1,000 liters/second to fulfill clean water services to the Gresik City area and to expand service coverage to the North Gresik area which has not been served by Perumda. Capacity building is carried out in collaboration with Business Entities with a Business to Business (B to B) system, namely with PT Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta (PT PPKT).

In the implementation process, there are obstacles, namely after the Detail Engineering Design (DED) was agreed upon by Perumda Giri Tirta and PT. PPKT, there is a change in the value of capex due to a change in the scope of work caused by the public authority, namely the VIII National Road Implementation Center and the condition of the subsurface (property authority), optimizing the design, causing changes in the scope of the Cooperation Agreement so that it requires an addendum to the agreement.

This study aims to analyze the basis for making changes to the investment value and the efforts that must be made so that changes in the investment value in SPAM development cooperation do not conflict with the laws and regulations.

This study uses empirical juridical research methods.

The results showed that before implementing the addendum to the agreement, Perumda Giri Tirta and PT Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta (PT PPKT) consulted with the Development and Finance Supervisory Agency (BPKP) Representative of East Java Province. On the advice of BPKP, both parties need to request an independent legal expert to provide a Letter of Opinion (LO) on the provisions of the agreement which are the basis for the amendment/addendum to the agreement and it is necessary to appoint an independent consultant to calculate the feasibility of the project in the financial model which will later be agreed upon by both par

Key words : Cooperation, investment, agreement, addendum to the agreement

DAFTAR ISI

Sampul depan	i
Sampul dalam	ii
Prasyarat gelar	iii
Lembar Persetujuan	iv
Panitia Penguji Tesis	v
Lembar Orisinalitas	vi
Ucapan Terima Kasih	vii
Ringkasan	ix
Summary	xi
Abstrak	xiii
Abstract	xiv
Halaman daftar isi	xv
Halaman daftar tabel	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Permasalahan	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16
2.2 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	18
2.3 Dasar Hukum Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	25
2.4 Kerjasama Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kapasitas 1.000 Liter/detik Pada Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik	28
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN	32
3.1 Kerangka Konseptual	32
3.2 Hipotesis Penelitian	33

BAB IV	METODE PENELITIAN	34
4.1	Tipe Penelitian	34
4.2	Pendekatan Penelitian	34
4.3	Sumber bahan hukum	35
4.4	Prosedur Pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum	40
4.5	Pertanggungjawaban Sistematika	40
BAB V	ANALISIS HASIL PENELITIAN	43
5.1	Profil Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik	43
5.1.1	Wilayah pelayanan	43
5.1.2	Kapasitas terpasang dan kapasitas produksi	44
5.1.3	Pelanggan	45
5.1.4	Pemakaian air pelanggan	46
5.1.5	Cakupan pelayanan	47
5.1.6	Kehilangan air	48
5.1.7	Kuangan	48
5.1.8	Kinerja	51
5.2	Pengembangan Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik	52
5.3	Dasar Hukum Perubahan Kontrak Dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	57
5.4	Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan Proyek Pengembangan SPAM Kapasitas 1.000 Liter/Detik Pada Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik	63
5.5	Ketentuan Perubahan Nilai Investasi Dalam Perjanjian Kerjasama Pengembangan SPAM Kapasitas 1.000 Liter/detik Pada Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik	66
BAB VI	PEMBAHASAN	74
6.1	Pelaksanaan Perubahan Nilai Investasi	75
6.2	Pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur ..	75
6.3	<i>Legal Opinion</i> (LO) dan Addendum	81
BAB VII	KESIMPULAN DAN SARAN	97
7.1	Kesimpulan	97

7.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021	44
Tabel 5.2	Perkembangan Jumlah Pelanggan Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021	45
Tabel 5.3	Pemakaian Pelanggan Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021	46
Tabel 5.4	Perkembangan Cakupan Pelayanan Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021	47
Tabel 5.5	Kehilangan Air Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021	48
Tabel 5.6	Neraca Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik Per 31 Desember Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021	49
Tabel 5.7	Laba (Rugi) Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021	49
Tabel 5.8	Full Cost Recovery Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021	50
Tabel 5.9	Kinerja Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021 Sesuai Permendagri No. 47 Tahun 1999	51